

Literatur Cetak

Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum Dan Etika)*, UII Press, Yogyakarta.

Abdul Latif. *Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil*. Jurnal Konstitusi 7 (1) Tahun 2010.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdulkadir Muhammad, 2021, *Etika Profesi Hukum (Cetakan Reproduksi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Agus Digdo Nugroho (et.al), 2020, *Dokumen Elektronik Tantangan Transformasi Karakteristik Akta di Era Digital dan Konsekuensi Hukumnya*, Sulur Pustaka, Yogyakarta.

Agus Digdo Nugroho (et.al), 2020. *Dokumen Elektronik Tantangan Transformasi Karakteristik Akta di Era Digital dan Konsekuensi Hukumnya*, Sulur Pustaka, Yogyakarta.

Agus Digdo Nugroho (et.al), 2022, *Hukum Administrasi Kependudukan Elektronik*, Nas Media Indonesia, Makassar.

Ahmad Hariri, *Penyidikan Tindak Pidana Di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2 (1) Februari 2014.

Andi Yuliani, *Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, 14 (04) Desember 2017.

Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Terhadap Akta Yang Dibuatnya Di Kabupaten Sleman, Prodi Kenotariatan UGM, Yogyakarta.

Arief Sidharta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

Atip Latipulhayat. Editorial: *Due Process of Law*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 2 (2) Tahun 2017.

Azza Azka Norra1, *Pertentangan Norma Fiktif Negatif Dan Fiktif Positif Serta Kontekstualisasinya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Peratun 3 (2) Agustus 2020.

Bogi Prihastiawan, 2016, *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Militer*, UMP, Purwokerto.

Dahlan, *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Di Bidang Kenotariatan*, Jurnal Kanun 18 (1) Tahun 2016.

Debby Nauli Rafeyfa Simanjuntak (et.al), *Kontribusi Dan Peran Polisi Militer Dalam Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia*, Jurnal Relasi Publik 2 (3) Agustus 2024.

Diana Hakim Koenjtoro, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum, Pembaruan Hukum Nasional, Refika Aditama, Bandung.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Donald Mamusung, 2020, *Kewenangan Pelimpahan Perkara Pidana Oleh Oditur Militer Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer (Tesis)*, Program Pascasarjana FH UGM, Yogyakarta.

Ega Ananda, *Teknik Pembuatan Perundang-Undangan: Prinsip, Metode, Dan Implementasi Dalam Sistem Hukum*, Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU) 2, (2). Maret 2025.

Elok Faikotul Hasana, *Pengertian Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal Media Akademik (JMA) 2 (12) Desember 2024.

Freddy Harris dan Lenny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 2020.

Ghansham Anand, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.

Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Hotma Pardomuan Sibuea & Heryberthus Sukartono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Krakatau Book, Jakarta.

J.W. Haris, 2009, *Law And Legal Science*, Clarendon Press, Oxford.

- John H. Farrar, 2017, *Introduction To Legal Method*, Sweet Maxwell, London.
- Jose Maria Maravall & Adam Przeworsky, 2003, *Democracy and the Rule of Law*, Cambridge University Press, Cambridge.
- M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1999, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, UI Press Jakarta.
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundangundangan*, PT Kanisius, Yogyakarta.
- Maskun & Setiyono, *Prosedur Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI AD (Studi di Subdenpom V/4-3 Pamekasan)*, MLJ Merdeka Law Journal 3 (2) 2022.
- Moch Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Madju, Bandung.
- Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad Reyhan Farabi, *Peranan Anjum Dan Perwira Penyerah Perkara (Papera) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Pengadilan Militer I-03 Padang*, Sumbang 12 Journal 3 (2) Januari 2024.
- Munir Fuady, 2011, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, Jakarta, Kencana.
- Munir Fuady, 2020, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta.

*Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan
Kewenangannya*, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 5 (1) Desember 2021.

Nawaaf Abdullah & Munsyarif Abdul Chalim, *Kedudukan Dan
Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik*, Jurnal Akta 4 (4
Desember 2017).

Ni Luh Ayu Widhiarcani Laksmidewi1, Ni Nengah Adiyaryani, *Kekhususan
dalam Tahapan Penyerahan Perkara di Peradilan Militer*, Jurnal
Pemuliaan Keadilan 1 (4) Oktober 2024.

Nikmah Rosidah, 2019, *Hukum Peradilan Militer*, Aura, Bandar Lampung.

Ofer Raban, 2003, *Modern Legal Theory and Judicial Impartiality*, The
Glass House Press, London.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana,
Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Teori Hukum The House of Law is The House
of Mankind*, Kencana, Jakarta.

R Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,
Pradnya Paramita, Jakarta.

Robert Barros, 2003, *Dictatorship and the Rule of Law: Rules and Military
Power in Pinochet's Chile*, dalam Jose Maria Maravall dan Adam
Przeworsky, *Democracy and the Rule of Law*, Cambridge University
Press, Cambridge.

Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana,
Jurnal Ilmu Kepolisian 17 (3) Desember 2023.

Salim HS dan Erlies SN, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian
Tesis dan Desertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis,
Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta*, Radja Grafindo
Persada, Jakarta.

Samuel Burry, *Dworkin on Ordinary Language Philosophy and Legal
Principles before the "Hart–Dworkin Debate, Modern Intellectual
History*, Cambridge University Press, 21 2024.

Santi Ayu Puteri, Aprillyna Ilmy Akmalia, Rinawasih, *Analisa Yuridis
Inkonsistensi Vertikal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020*, Jurnal Education and development 10 (1) Januari 2022.

Satria Mega Nurcahya, 2020, *Perlindungan Oleh Majelis Kehormatan
Notaris (MKN) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Terhadap Notaris
Yang Dipanggil Penyidik Terkait Akta Yang Dibuatnya Di Kabupaten
Klaten (Tesis)*, Prodi Kenotariatan UGM, Yogyakarta.

Siti Maimunah Syaputri, *Tanggung Jawab Notaris Untuk Memberikan
Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan
Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan
Notaris*, Rio Law Jurnal, 1 (2) Februari 2025.

Soegiri, 2005, *Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik
Indonesia*, CV Indra Jaya, Jakarta.

SR Sianturi, 2005, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

Stephani Gabriella Wijayawati, *Rule Of Law In The Eyes Of European Constitutionalism: Lessons For Indonesia*, Jurnal Juris Gentium Law Review 9 (1), September 2023.

Suginato, 2018, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Deepublish, Sleman.

Teguh Prasetyo, *Rule Of Law Dalam Dimensi Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi Otober 2010.

Tongam Renikson Silaban (et.al), 2022, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Acara Pidana: Penyelidikan Dan Penyidikan*, Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN, Jakarta.

Vania Twidesyadinda, 2021, *Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemanggilan Notaris untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana*, Prodi Kenotariatan UGM, Yogyakarta.

Wiwik Harjanti, *Bahasa Hukum Dalam Prespektif Rasionalisme*, Risalah Hukum Fakultas Hukum 6, (1) Unmul, Juni 2010.

Yudi Setia Permana (et.al), *Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyimpanan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Perikatan Jual Beli Bertahap*, Jurnal IUS 5 (3)|Desember 2017

Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara

Pidana;

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

Jabatan Notaris;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019.

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/980/XII/2014 tanggal 16 Desember

2014, tentang Petunjuk Administrasi Oditurat dalam Penyelesaian

Perkara Pidana di lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

Peraturan Kasad Nomor Perkasad/24-02/IX/2011 tanggal 1 September 2011

tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan

Doktrin dan Buku Petunjuk Angkatan Darat;

Peraturan Kasad Nomor Perkasad/44-02/IX/2011 tanggal 30 September

2011 tentang Buku Petunjuk Teknis Tindakan Pertama di Tempat

Kejadian Perkara (TKP);

Peraturan Kasad Nomor Perkasad/56-02/XII/2012 tanggal 28 Desember

2012 tentang pengesahan berlakunya buku petunjuk teknis tentang

tata cara penyusunan Buku Petunjuk Angkatan Darat;

Peraturan Kasad Nomor Perkasad/76/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013

tentang pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Induk tentang Polisi

Militer;

pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Administrasi tentang
Penyelenggaraan Adiministrasi Umum Angkatan Darat;

Keputusan Kasad Nomor Kep 552/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang
Petunjuk Tehnis tentang Penyidikan Perkara;

Surat Keputusan Danpuspomad Nomor Skep/107/X/2004 tanggal 14
Oktober 2004 tentang pengesahan berlakunya Naskah Sementara
Buku Petunjuk Administrasi Penyidikan;

Keputusan Danpuspomad Nomor Kep/80/IX/2014 tanggal 8 September
2014 tentang Pedoman Administrasi tentang Penyelenggaraan
Administrasi Penyidikan.

Keputusan Penyerahan perkara dari Komandan Korem 083/BDJ selaku
Papera Nomor: Kep/16/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang
Penyerahan perkara.

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/75/K/AD/VII/2023 tanggal 20
Juli 2023.

Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12
Surabaya Nomor TAP/96-K/PM.III-12/AD/VIII/2023 tanggal 14
Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim.

Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor
TAPTERA/96-K/PM.III-12/AD/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023;

Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/96-K/PM.III-
12/AD/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023.

<https://kaltim.kemenkum.go.id/layanan-2/standar-layanan/adm-hukum->

umum-

2/Notaris#:~:text=Notaris%20adalah%20seorang%20pejabat%20um

um,lainnya%20yang%20memiliki%20kekuatan%20hukum. Diakses

pada 24 Maret 2025

Fainnadya Kaligis & Daniel F. Aling, Aspek Perlindungan Hukum Bagi

Notaris Terhadap Malpraktek Dalam Pembuatan Akta,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum>.

Erik Wolf, 1950, Gustav Radbruch Rechtsphilosophie, Kohler Verslag,

Stuttgart. <https://philpapers.org/rec/RADR-5>

Wawancara:

Agus Digdo Nugroho, 2025, Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris

Dalam Pemeriksaan Notaris Sebagai Saksi Untuk Kepentingan

Penyidikan Perkara Pidana Militer, Wawancara, Jakarta, 14 April.

Ateng Karsoma, 2025, Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Dalam

Pemeriksaan Notaris Sebagai Saksi Untuk Kepentingan Penyidikan

Perkara Pidana Militer, Wawancara, Jakarta, 9 April.

Kolonel Laut (H) Sunariyadi, S.H., MH. 2025, Persetujuan Majelis

Kehormatan Notaris Dalam Pemeriksaan Notaris Sebagai Saksi

Untuk Kepentingan Penyidikan Perkara Pidana Militer, Wawancara,

Oditurat Militer III-11 Surabaya, 13 April.

Kehormatan Notaris Dalam Pemeriksaan Notaris Sebagai Saksi
Untuk Kepentingan Penyidikan Perkara Pidana Militer, Wawancara,
Pengadilan Militer III-12 Surabaya, 09 April.

Mayor CPM Nur Makhmud, 2025, Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris
Dalam Pemeriksaan Notaris Sebagai Saksi Untuk Kepentingan
Penyidikan Perkara Pidana Militer, Wawancara, etasemen Polisi
Militer V/3 Malang Pomdam V/Brawijaya, 09 April.